



KETIKA AHOK MENANTANG BPK BUKA-BUKAAN HARTA

GUBERNUR Ahok Senin lalu benar-benar merasa "dikerjain" BPK. Sidang paripurna DPRD DKI - BPK membahas audit keuangan Pemprov DKI 2014. Anehnya, Gubernur Ahok yang juga hadir, sama sekali tak diberi salinan audit BPK itu. Padahal opini keuangan Pemprov yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) itu kan penanggung-jawabnya Ahok. Gubernur yang rupanya tahu "permainan" di BPK, menantang para pejabat BPK buka-bukaan soal harta kekayaannya.



Setiap Kepala Daerah selalu ingin mendapat opini dari BPK bahwa pengelolaan keuangannya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), bukan WDP apa lagi disclaimer (jelek sekali). Tapi untuk bisa memperoleh itu harus ada taripnya kepada oknum-oknum auditor BPK. Ini dibuktikan dari sejumlah sidang Tipikor saat mengadili para tersangka korupsi.

Saat mengadili eks Walikota Bekasi Mohtar Mohammad (2010), terungkap bahwa dua auditor BPK Enang dan Suharto menerima Rp

400 juta agar opini keuangan Pemkot Bekasi menjadi WTP. Dalam sidang korupsi SKK Migas (2014), ternyata Rudi Rubiandini juga memberikan Rp 400 juta kepada ouditor BPK Khairiansyah Salman. Dan kabarnya, di jaman sebelum Gubernur Jokowi-Ahok, menjelang pengumuman Opini BPK oknum auditor juga ambil setoran ke DKI.

Dari sini nampaklah jelas bahwa tantangan Gubernur Ahok agar pejabat BPK berani buka-bukaan harta kekayaannya, agak salah

alamat. Kalau 9 petinggi BPK-nya sih dijamin bersih-bersih, tapi oknum-oknum auditornya itulah yang perlu dicurigai. Sebab merah-birunya rapor keuangan, dari merekalah semuanya berasal. Tapi tak salah juga ketika Ahok menganjurkan kepada pejabat Pemprov DKI, jika mau aman korupsi cari teman oknum-oknum BPK-lah.

Yang bikin Ahok terheran-heran, soal mark up anggaran oleh BPK kok tidak dikategorikan korupsi, karena semuanya sudah

melalui proses lelang. Tambah heran lagi, daerah yang dinyatakan WTP, ternyata Kepala Daerahnya ada yang bermasalah. Tambah heran lagi, di masa sebelum Jokowi-Ahok, keuangan Pemprov DKI bagus melulu di mata BPK, padahal di sana banyak kebocoran anggaran.

Karenanya kini Gubernur Ahok persetan dengan penilaian BPK. Dinilai "disclaimer" pun tak peduli, yang penting uang Pemprov DKI tak ada yang dicolong. - gunarso ts